

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 269/KEP/2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2020 - 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan mitra dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah dengan memposisikan Kalurahan dan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang sejalan dengan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk kepengurusan untuk masa bakti 2020 - 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 - 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 – 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 AGUSTUS 2021

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENOKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah DIY;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
- 3. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan;
- 4. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 269/KEP/202(
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN
PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2020 - 2025

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2020 – 2025

DEWAN FASILITATOR

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI		
I	Ketua	Sekretaris Daerah DIY		
II	Anggota :	Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan		
		2. Kepala Bappeda DIY		
		3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat		
		Sekretariat Daerah DIY		

DEWAN PAKAR

NO	JABATAN	NAMA Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D	
I	Ketua		
II	Anggota :	1. Dra. Sri Adiyanti	
		2. Dra. Wadjarni Rasdan	

PENGURUS HARIAN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I	Ketua	KPH Notonegoro	Kota Yogyakarta
II	Wakil Ketua I	BPH Kusumo Kuntonugroho	Kota Yogyakarta
III	Sekretaris	Ir. Ariyadi Bowoleksono	Kota Yogyakarta
IV	Wakil Sekretaris	Suharni	Kabupaten Gunungkidul
V	Bendahara	Djoto	Kabupaten Kulon Progo
VI	Wakil Bendahara	Maqomi Nurosid	Kabupaten Sleman
VII	Humas, Komunikasi dan	1. Suyanto, S.Pd	Kabupaten Kulon Progo
	Publikasi	2. Edy Sutrisno	Kabupaten Gunungkidul
		3. Agus Widodo	Kota Yogyakarta

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
VIII	Hukum, Organisasi dan	1. Sutopo, SH	Kabupaten Kulon Progo
	Kelembagaan	2. DR. Kelik Endro	Kota Yogyakarta
		Sriyono, SH, MH	
		3. Ali Arifin, M.Pd	Kabupaten Bantul
IX	Pendidikan, Pemberdayaan	1. Tukijo, S.IP	Kabupaten Bantul
	Keluarga, Kesehatan dan	2. Tri Wahyuni	Kabupaten Gunungkidul
	Lingkungan Hidup	3. H. Hipnie Tamrin	Kabupaten Sleman
X	Sosial, Tenaga Kerja dan	1. Joko Suharyanto	Kabupaten Sleman
	Penanggulangan	2. Wiwiek Ngesti	Kota Yogyakarta
	Kemiskinan	3. Subardi SPKP	Kabupaten Bantul
XI	Pemukiman, Infrastruktur	1. Ir. Suhadi Datun, IAI	Kota Yogyakarta
	dan Tata Ruang	2. A.Y. Barsono	Kabupaten Gunungkidul
		3. Sukardi	Kabupaten Sleman
		4. Rahmat Widada	Kabupaten Bantul
XII	SDA, Pertanian,	1. Suharto, S.Pd	Kabupaten Bantul
	Peternakan, Kehutanan	2. Ir. Gardani	Kota Yogyakarta
	dan Nelayan	3. Nur Asbari	Kabupaten Gunungkidul
		4. Istiyadi Subekti	Kabupaten Sleman
XIII	Koperasi, UKM,	1. Gutomo SH	Kabupaten Kulon Progo
	Perdagangan, Industri dan	2. Mujiyanto	Kabupaten Gunungkidul
	Pariwisata	3. Joharnomo, ST	Kota Yogyakarta
		4. Suparja	Kabupaten Sleman
XIV	Seni, Budaya, Pemuda dan	1. Sumadi, SE, MM	Kabupaten Sleman
	Olah Raga	2. Fitrianingsih, SH	Kabupaten Kulon Progo
		3. Subekti	Kabupaten Bantul

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X